

**ANALISIS PERBANDINGAN AKUNTANSI PENDAPATAN BERBASIS
AKRUAL DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN
SESUDAH MENGGUNAKAN SIMDA (STUDI KASUS KOTA MADYA
MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh:

NANTA AFSYARI POHAN

NIM: 0503161014

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS PERBANDINGAN AKUNTANSI PENDAPATAN BERBASIS
AKRUAL DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN
SESUDAH MENGGUNAKAN SIMDA (STUDI KASUS KOTA MADYA
MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

NANTA AFSYARI POHAN

NIM: 0503161014

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanta Afsyari Pohan
Nim : 0502161014
Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidempuan, 03 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Paya Bujing, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual Dalam Menyusun Laporan Keuangan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan SIMDA (Studi Kasus Kota Madya Medan)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Maret 2021

Yang membuat pernyataan

Nanta Afsyari Pohan

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PERBANDINGAN AKUNTANSI PENDAPATAN BERBASIS
AKRUAL DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEBELUM
DAN SESUDAH MENGGUNAKAN SIMDA (STUDI KASUS KOTA
MADYA MEDAN)**

Oleh :

Nanta Afsyari Pohan

NIM. 0502161014

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 21 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Marliyah, MA

Ak

NIDN. 2026017602

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, M.

NIDN. 0126099001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA

NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SESUAH MENGGUNAKAN SIMDA (STUDI KASUS KOTA MADYA MEDAN)” an. Nanta Afsyari Pohan, NIM 0502161014 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU pada tanggal 18 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 22 Maret 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah
UIN-SU

Ketua



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIDN. 2001077903

Sekretaris



Hendra Harmain, M. Pd
NIDN. 2010057302

Anggota



1. Dr. Marliyah, M. Ag
NIDN. 2026017602



2. Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001

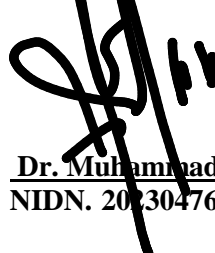


3. Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIDN. 2001077903



4. Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak
NIDN. 199408112019032016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2003047602

ABSTRAK

Nanta Afsyari Pohan, 2020. Analisis Perbandingan Akuntansi Berbasis AkruaL Dalam Menyusun Laporan Keuangan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan SIMDA (Studi Kasus Kota Madya Medan). Di bawah bimbingan, Pembimbing I oleh Ibu Dr. Marliyah, MA dan Pembimbing II oleh Bapak Rahmat Daim Harahap, M. Ak.

Berlakunya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 membawa tatangan baru dalam dunia akuntansi Pemerintahan Daerah termasuk di Kantor Walikota Medan yang menggunakan SIMDA. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pengamatan wawancara, observasi, analisis dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan komponen laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA. Sebelum menggunakan SIMDA di Kantor Walikota Medan pada tahun 2015 dan 2016 komponen laporan keuangannya ada 5 (Lima) dan belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, sedangkan pada tahun 2017 di Kantor Walikota Medan sudah menggunakan SIMDA dan sudah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 dan komponen laporan keuangannya sudah menjadi 7 (Tujuh), yang menjadi tambahannya adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Operasional (LO). Penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Walikota Kota Medan telah diterapkan sejak tahun 2015, tetapi pada awal penerapan belum sesuai karena di awal penerapan masih banyak kendalanya. Pada tahun 2017 s/d sekarang sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Terdapat kendala dalam menggunakan SIMDA yaitu Kesalahan teknis yaitu kesalahan jaringan.

Kata Kunci : Akuntansi Pendapatan, Standar Akuntansi Berbasis AkruaL, Laporan Keuangan, Aplikasi SIMDA.

ABTRACT

Nanta Afsyari Pohan, 2020. Comparative Analysis Of accrual-based accounting in preparing financial reports before and after using the SIMDA (Study In The Municipality Of Medan). Under the guidance, of I by Dr. Marliyah, MA and II by Mr. Rahmat Daim Harahap, M. Ak.

The enactment of government regulation number 71 of 2010 concerning accrual-based government accounting standards (SAP) brought about major changes in the financial reporting system in Indonesia. And the implementation of Government Regulation number 17 of 2010 brings new challenges in the world of regional government accounting including in the Medan Mayor's Office that uses SIMDA. This study aims to analyze the comparison of accrual-based income accounting in preparing financial reports before and after using SIMDA. The method used by the researcher is descriptive qualitative method through observation, interview, observation, analysis and making conclusions. The results showed that there were differences in the components of the financial statements before and after using SIMDA. Before using the SIMDA in the mayor's office in Medan in 2015 and 2016 there were 5 (five) components and they were not in accordance with PP No. 71 of 2010, and in 2017 the Medan mayor's office has used SIMDA and is in accordance with PP No. 71 of 2010 and the financial statement component has become 7 (seven), the additions are the report on changes in excess budget balance (SAL) and operational reports (LO). The application of accrual-based accounting at the Medan mayor's office has been in place since 2015, but at the beginning of the implementation it was still not suitable because at the beginning of the implementation there were still many obstacles. And since 2017 until now it has been in accordance with PP No. 71 of 2010. And there are obstacles in using SIMDA, namaely technical errors namely network errors.

Keywords : *Income accounting, Accrual based government accounting standards,*

Financial statement, SIMDA Application.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Serta sholawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual Dalam Menyusun Laporan Keuangan Subelum Dan Sesudah Menggunakan SIMDA (Studi Kasus Kota Madya Medan)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini banyak pihak yang member bantuan, motivasi serta do'a kepada penulis, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak, yaitu:

1. Yang paling spesial untuk kedua Orang Tua penulis, yaitu Matahari Pohan dan Dahlia Hasibuan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan do'a, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak bisa ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada Rinanti Ito Pohan, Mutia Sary Pohan dan Fauzan Hermawan Pohan adik penulis yang telah memberikan motivasi, dukungan serta do'a. beserta seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia mendoakan dan membantu penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Yafis, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam, terima kasih telah member kesempatan kepada penulis untuk

mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, M.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Marliyah, MA selaku pembimbing I dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M. Ak selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan sumbngan pemikiran dan waktu hingga skripsi ini bisa selesai.
7. Ibu Dr. Kamilah S.E. AK. M.Si. CA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dalam penulisan proposal skripsi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan program perkuliahan sesuai dengan yang diharapkan.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
9. Seluruh Anggota/Staff BPKAD khususnya di Bidang Akuntansi dan Bidan Kas yang telah meluangkan waktunya kepada peneliti ditengah kesibukannya.
10. Teman- teman seperjuangan AKS-C (Akuntansi Syariah-C) 2016 yang telah berjuang bersama-sama peneliti selama masa perkuliahan.
11. Teruntuk Sahabat Kontrakan Bidadari Surga (Era, Nadila, Nisa, Triani, Roni) yang juga sedang berjuang bersama dan saling membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Teman-teman Alumni Pesanteren Modern Baharuddin (Aynil, Lila, Susi, Juri, Abbas, Dehri, Bahrul) yang juga sedang berjuang bersama dan saling membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Keluarga IMKHSU (Ikatan Mahasiswa Kecamatan Huristak Sumatera Utara) terima kasih telah banyak membantu, menemani penulis.

14. Kepada Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
15. Kepada Keluarga Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
16. Untuk Siti Rohani Hasibuan Sahabat saya dan Marwan Harahap Abang Saya, yang sama-sama berjuang dalam segala hal, yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, menemani, dan menghibur penulis.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dorongan yang diberikan semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan isi skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan, Aamiin ya Rabbal'Alaamiin.

Medan, Februari 2021

Penulis



Nanta Afsyari Pohan
NIM. 0502161014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Identifikasi Masalah 9
- C. Batasan Masalah 9
- D. Rumusan Masalah 9
- E. Tujuan Penelitian 9
- F. Manfaat Penelitian 10

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kajian Teoritis 11
 - 1. Akuntansi Pemerintahan 11
 - a. Pengertian Akuntansi Pemerintah 11
 - b. Standar Akuntansi Pemerintahan 13
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 19
 - 2. Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Indonesia 24
 - a. Dasar Akuntansi Pendapatan 24
 - b. Pengakuan, pengukuran, dan Pengungkapan
Pendapatan 26
 - 3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan
Pemerintah Pusat 27
 - 4. Sistem Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat 31
 - 5. Perbandingan Basis Kas dengan Basis Akrual 34
 - a. Akuntansi Berbasis Kas 34
 - b. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual 35

c. Akuntansi Berbasis Akrua.....	36
d. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah	38
6. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	39
7. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ..	40
a. Keunggulan dan Manfaat Penggunaan SIMDA	40
b. Perkembangan Aplikasi Informasi Manajemen Daerah SIMDA	42
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	48
1. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Analisis Data	49
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kantor Walikota Medan.....	52
1. Sejarah Pemerintahan Kota Medan	52
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	56
B. Temuan Penelitian.....	75
C. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 2.1	Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SAP Basis Kas Menuju AkruaI dan SAP Berbasis AkruaI	20
Tabel 2.2	Jurnal Pengakuan Pendapatan-LO	28
Tabel 2.3	Jurnal Pengakuan Pendapatan-LRA	29
Tabel 2.4	Jurnal Pencatatan Pendapatan Perpajakan	30
Tabel 2.5	Jurnal Pengakuan Pendapatan Perpajakan	31
Tabel 2.6	Perkembangan Aplikasi SIMDA	39
Tabel 2.7	Daftar Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1	Waktu Peneltian	46
Tabel 3.2	Data Subjek Penelitian	46
Tabel 4.1	Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Menggunakan SIMDA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	43
Gambar 4.1 Lambang Kota Medan	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Walikota Medan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi Keuangan Negara telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang dibidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa, “pendapatan dan belanja dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dicatat menggunakan basis akrual”. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya.

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan terhadap terbitnya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut kemudian diganti dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selama ini pemerintah masih menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual yang berlandas pada peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa pendapatan perpajakan diakui ketika kas masuk ke Rekening Negara. Penerepan basis kas ini memudahkan pencatatan dan pelaporan pendapatan pajak karena hanya berdasarkan pada pendapatan pajak tahun fiskal tertentu tanpa memperhatikan kapan sebenarnya pendapatan tersebut dihasilkan.

Namun, hal ini menimbulkan kelemahan karena pendapatan yang dilaporkan menjadi kurang mempersentasikan keadaan sebenarnya sehingga pelaporannya menjadi kurang handal dan akuntabel.

Terkait dengan upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, tansparan, efektif, dan efisien tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi keuangan sejak tahun 2003 dengan ditetapkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan masih terus berkelanjutan. Salah satu bentuk usahaberkelanjutan tersebut adalah keluarnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) AkruaI mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tersebut, maka PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Berlakunya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanahkan oleh paket Undang-Undang keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.¹

Namun kenyataannya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia. Sehingga sampai saat ini belum bisa diterapkan secara penuh dan masih menggunakan sistem akuntansi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yaitu basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Menurut Halim, tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin kuat dan adanya dorongan dari lembaga-lembaga Internasional, seperti *Organisation For*

¹Soni Lamonisi, *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI PadaPemerintahan Kota Tomoho*, (Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1 Maret 2016), h. 2.Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2016.

Economic Cooperation and Development (OECD), *The International Monetary Fund (IMF)*, dan *World Bank*, untuk menerapkan basis akrual kepada Negara-negara yang ada di dunia menyebabkan pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem akuntansinya.² Hal tersebut mendorong pemerintah pada tahun 2010, melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Sejak diterbitkannya standar akuntansi berbasis akrual tersebut, pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel mulai semakin membaik. Hal tersebut tercermin dari laporan keuangan yang disajikan pemerintah. Namun ternyata pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut juga belum diterapkan secara penuh oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari laporan anggaran pemerintah yang masih menggunakan akuntansi anggaran basis kas. Menurut Halim, apabila pemerintah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, maka seharusnya akuntansi anggarannya juga harus akrual.³ Hal inilah yang menjadi tanda tanya bagi masyarakat tentang sistem akuntansi berbasis akrual yang dijalankan pemerintah saat ini.

SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut

²Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 44

³*Ibid.*, h. 46

merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.⁴

Menurut Mulyana menyebutkan bahwa, “salah satu isu yang menjadi perhatian dalam penerapan akuntansi akruaI adalah penerapan basis akruaI untuk pendapatan perpajakan”.⁵ Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah berusaha untuk meminimalisir masalah penerapan perpajakan berbasis akruaI dengan mengeluarkan paket peraturan Meteri Keuangan yang menjadi acuan pelaksanaan akuntansi berbasis akruaI untuk pendapatan perpajakan.

Pendapatan dari sektor perpajakan merupakan komponen penyumbang pendapatan yang memiliki porsi tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia. Berdasarkan alasan inilah implementasi tentang kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi pendapatan perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Pendapatan perpajakan di Indonesia meliputi Pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai.

Pemerintah memiliki andil besar terhadap kebijakan, sistem, serta prosedur akuntansi yang dipakai dalam mengakui pendapatan perpajakan dalam kaitannyadalam menciptakan *good governance*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibidang pengakuan dan pelaporan pendapatan perpajakan dalam rangka mencapai *good governance* adalah

⁴Herwiyanti Eliada, dkk, (*“Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan”* dalam Jurnal AkuntansiVol. 19 No. 1 2017), h. 2

⁵Mulyana Deddy, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: 2011), h. 22

merupakan akuntansi berbasis akrual dari yang semula menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual terhadap akuntansi pendapatan perpajakan.

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam organisasi pemerintahan adalah penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan yang merupakan sistem database yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah dalam sistem akuntansinya mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Dalam situs resmi BPKP dijelaskan bahwa aplikasi SIMDA keuangannya dirancang dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya produk dari Deputy IV yaitu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Aplikasi SIMDA muncul setelah adanya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya, dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat 3. Selain itu penerapan aplikasi SIMDA juga didukung dengan dikeluarkannya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengembangan SIMDA. Aplikasi ini dikembangkan guna memudahkan OPD dalam mengelola data keuangan mereka sehingga nantinya pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Kantor Walikota Medan diketahui bahwa Kantor Walikota Medan adalah Instansi Pemerintah yang menggunakan APBN/APBD dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, Kantor Walikota Medan merupakan Instansi yang termasuk dalam ruang lingkup SAP dalam penerapan prosedur sistem akuntansinya dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kantor Walikota Medan mulai Tahun 2015 telah menerapkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dalam menyusun laporan keuangan. Penerapannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK. 05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat.

Pendapatan pada Kantor Walikota Medan Sumatera Utara terbagi menjadi tiga sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA, Lain-lain PAD Yang Sah-LRA. Pendapatan Transfer Daerah-LRA terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA, Bantuan Keuangan-LRA. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA terdiri dari Pendapatan Hibah-LRA.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrua. Dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk yang menerapkan akuntansi basis akrua telah sesuai untuk pengakuan, penilaian dan penyajian pos-pos dalam

neraca, kecuali pengukuran piutang yang tidak mencatat nilai piutang sebesar nilai nominal, melainkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Alexander, menyatakan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji.⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rudi Abdullah, menyatakan bahwa KPP Pratama Baubau telah melaksanakan akuntansi pendapatan perpajakan dengan basis akrual berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 dan aturan pendukung lainnya. Pendapatan perpajakan diakui ketika munculnya hak pemerintah atas pendapatan perpajakan. Pencatatan pendapatan perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan jurnal Standar Akuntansi Instansi. Pelaporan Pendapatan Perpajakan KPP Pratama Baubau disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Dedi, selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, bahwa dalam penyajian laporan keuangan pada Kantor Walikota Medan telah menyajikan komponen laporan keuangan berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.⁹

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa di Kantor Walikota Medan belum sepenuhnya menggunakan akuntansi berbasis akrual, bahwa penyajian laporan

⁶Firdaus, Dahlia, Djoko sigit suyogo and Sri wahyuni latifa, “ *Evaluasi Penerapan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : Studi Kasus di Pemda Nganjuk*”. Jurnal Akuntansi dan Investasi, (Vol.16 No. 1 Januari 2015),

⁷Langelo, F. D. P. E. Saerang dan S.W. Alexander, “ *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Bitung*”. (Jurnal EMBA. Vol. 3.No. 1. 2015).

⁸ Rudi Abdullah, “ *Analisis Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual : Studi Kasus KPP Pratama Medan*”. Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis, (Vol. 18. No. 2 Oktober 2017)

⁹Wawancara dengan Dedy, tanggal 19 Maret 2020 di Kantor BPKAD Kota Medan.

keuangan Kantor Walikota Medan Anggaran 2016 belum sepenuhnya menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005. Pada saat menyusun laporan keuangan ada terdapat beberapa perbedaan komponen laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA, dan terdapat beberapa kendala pada saat menggunakan SIMDA.

Dengan diterapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual ada terdapat beberapa kendala yaitu, dengan menggunakan basis akrual piutang tak tertagih cenderung menjadi lebih banyak. Seperti yang kita ketahui pada akuntansi berbasis kas uang yang ada akan langsung dicatat, dan pada sistem akuntansi berbasis akrual akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Misalnya kita sudah mencatat jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan ternyata perusahaan A seharusnya jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun ini bisa menghasilkan Rp 10.000.000,00, ternyata perusahaan itu sampai akhir tahun hanya menyetorkan sejumlah Rp 8.000.000,00, otomatis pencapaian perusahaan tersebut tidak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Adanya selisih sebanyak Rp 2.000.000,00, akhirnya dicatat dengan piutang. Dan dilaporan Neraca akan muncul dengan piutang pendapatan, jika tahun ke tahun nilai piutang belum terselesaikan maka piutang tersebut akan bertambah menjadi akumulasi piutang pendapatan.

Pada tahun 2018 Center Point masih menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 5 miliar lebih, ungkap Camat Medan Timur P Pasaribu. Dia mengatakan, akibat tunggakan tersebut, target Kecamatan Medan Timur tidak tercapai. Adapun tahun realisasi tahun 2018 hanya mencapai 56 persen atau sebesar Rp 17 miliar lebih. Menurutnya, jika Centre Point melunasi PPB-nya, maka persentase pencapaian tahun ini bisa mencapai 76 persen.¹⁰

¹⁰ <https://medan.tribunnews.com>

Seperti yang kita ketahui pada tanggal 03 maret 2020 Kantor Walikota Medan melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan menurunkan tim pelaksanaan penagihan Tunggalan Pajak Daerah untuk mendatangi Restoran Uncle K di Lantai IV Sun Plaza Medan. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki BPPRD, tempat makan yang senantiasa ramai dikunjungi warga, terutama saat weekend tersebut ditengarai menunggak pajak restoran sebesar Rp 1.043.514.117.¹¹

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan karena untuk melihat kesesuaian dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Dengan demikian penulis melakukan penelitian ilmiah dengan bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Perbandingan Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual Dalam Menyusun Laporan Keuangan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan SIMDA Pada Kota Madya Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka identifikasi masalah adalah:

1. Adanya perbedaan laporan keuangan sesudah dan sebelum menggunakan SIMDA.
2. Adanya kendala dalam penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan.
3. Kantor Walikota Medan belum sepenuhnya siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual paa tahun 2015 dan 2016.
4. Adanya hambatan dan manfaat menggunakan SIMDA.

¹¹ <https://waspada.id>

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada beberapa masalah, yaitu :

1. Penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA pada Kantor Walikota Medan.
2. Kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Kantor Walikota Medan.
3. Kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Kantor Walikota Medan dengan menggunakan SIMDA.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Kantor Walikota Medan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA?
2. Apakah penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Kantor Walikota Medan sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010?
3. Apakah yang menjadi kendala bagi Kantor Walikota Medan dalam menerapkan PP No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam menggunakan SIMDA?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadikan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Kantor Walikota Medan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 pada Kantor Walikota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala bagi Kantor Walikota Medan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual menggunakan SIMDA.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menambah pemahaman penulis tentang laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA.
2. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitiann.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Akuntansi pemerintahan

a. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Keuangan Pemerintahan sebagaimana disebut dalam pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, sebagai berikut:

- 1) Menteri Keuangan/pejabat pengelola keuangan Negara/Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.
- 2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawab.¹

Akuntansi keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan akuntansinya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06.2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP), yang ada dipusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang dikerjakan di setiap Kementerian/Lembaga.

SAP terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas pemerintah pusat, dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi.

¹Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 3. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.25.

Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat. dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Kantor Akuntansi Regional (KAR) yang memproses data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kantor Akuntansi Khusus (KAK) yang memproses data dari kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan KPPN khusus.

Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akutansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap Kementerian/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tahunan dimaksud dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (yang ada dibawah pengawasannya) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas pengguna dana Anggaran Pembiayaan dan perhitungan dikirimkan kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Karakteristik akuntansi pemerintah dapat disebabkan karena adanya lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sector pemerintahan meliputi beberapa factor yaitu:

a) Faktor Ekonomi

Factor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sector public tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, perubahan pendapatan berkapita (Gross National Domestic Product), struktur produksi, tenaga kerja. Arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sektor informal.

b) Faktor Politik

Beberapa faktor politik yang mempengaruhi sektor publik adalah hubungan Negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi Negara, elit politik dan massa, jaringan internasional dan kelembagaan.

c) Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik adalah: keragaman suku/ras/agama/bahasa/budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan.

d) Faktor Demografi

Faktor-faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi dan tingkat kesehatan.²

b. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Menurut Mahmudi, bahwa standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akuntansi tersebut dikenal dengan istilah kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Secara

²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: 2018), h. 3-4.

umum basis kas pada akuntansi telah lama ditinggalkan oleh para penyelenggara laporan akuntansi dan telah beralih ke basis akrul.

Menurut Mahsun, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.³

Menurut Wijaya, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Adapun definisi menurut Indra Bastian, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan menurut Ritonga, bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan untuk para pengguna laporan keuangan.⁴

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) DAN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Menurut Nordiawan et al, Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Standar

³Mahsun, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga* (Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 57.

⁴Wijaya, "Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel". *Jurnal Akuntansi* (Vol. 3.No. 4 Desember 2015).

akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) Pengakuan; (2) Pengukuran; (3) pengungkapan.⁵

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas serta dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan “*hafazhatul amwal*” (pengawas keuangan). Bahkan Al-Qur’an menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang. Yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomi dalam hal tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui Q.S al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا

⁵Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 69.

يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akanditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadannya), atau dia seendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wali mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah denan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya. Jangan lah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan jangan lah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa diantara kam, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menysulitkan. Jika kam lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarin, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".⁶

Sa'id bin musayyab mengatakan: Aku telah diperintahkan untuk memberitahukan ayat Al-Qur'an yang tertulis diatas Arsy, yakni ayat tentang bermuamalah.⁷ Pencatatan bermuamalah sebagai sebuah konsep yang dibutuhkan oleh manusia juga diperkuat oleh keberadaan ilmu akuntansi sebagai sebuah pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh manusia.⁸ Ilmu tersebut berkonsentrasi dengan istem tentang proses mengenali, mengukur dan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* h. 397

⁷*Ibid.*, h. 85

⁸*Ibid.*, h. 87

mengkomunikasikan hasil dalam sebuah laporan keuangan unuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai laporan keuangan yang bersangkutan.

Quraisy Shihab menuturkan penafsiran tentang ayat ini dari segi urutan ayat. Ayat inidiletakan setelah ayat yang menganjurkan sedekah dan berinfak (al-Baqarah 171-174), kemudian disusul dengan ayat larangan transaksi riba (ayat 275-279) juga sikap terhadap pihak yang tidak mampu membayar baik dengan memberi tangguh maupun menyedekahkan sebagian atau bahkan semua hutang tersebut (ayat 280).

Letak ayat akuntansi, menurut beliau, mengandung arti bahwa pencatatan transaksi (akuntansi) mengharapkan keadilan, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah denggan kekejaman yang diperagakan oleh riba.

Seruan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ini secara eksplisit mengesankan bahwa transaksi dan pencatatannya hendaknya ditujukan untuk menggapai ridho-Nya. Artinya, ia patuh dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang melekat dan mengikat manusia untuk tetap beraa pada jalur syariah. Prinsip yang terkandung dalam ayat 282 surah al-Baqarah yaitu keadilan, benar, jujur dan tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat kita saksikan dari sejarah bahwa ternyata islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi, karena Al-Qur'an telah diturunkan pada tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494 M.

Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi untk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
(١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى (١٨٤)

Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.⁹

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur/menakar tersebut, juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah peraturan yang berisi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mengatur tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Dapat dikatakan juga peraturan tersebut merupakan kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Menurut Firdaus, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yakni basis akrual, sehingga dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan entitas pelaporan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Entitas laporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.¹⁰

⁹ *Ibid.*, h. 399

¹⁰ *Ibid.*, h. 88.

Menurut Firdaus, Acuan KSAP sebagai penyusun Standar Laporan Keuangan Pemerintah, pemerintah dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan masalah yang belum diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Lingkup pengaturan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI. SAP Berbasis AkruaI terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Menuju AkruaI (PP 24/2005) pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Lampiran III PP No 71 Tahun 2010 menjelaskan tentang proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.¹¹

Menurut Ratmono, perbedaan masing-masing standar yang termuat dalam lampiran-lampiran peraturan pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010.¹²

Tabel 2.1

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SAP Kas Menuju AkruaI dan SAP Berbasis AkruaI.

No	Keterangan	SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI	SAP Berbasis AkruaI
1.	Komponen laporan keuangan	Laporan Keuangan Pokok: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan yang Bersifat Optional : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK) 2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 	Laporan Anggaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan Finansial: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Arus Kas (LAK)

¹¹Ibid, h. 89.

¹²Ratmono, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015), h. 80.

			<p>4. Laporan Perubahan Ekuitas (LAK)</p> <p>5. Catatan Atas Laporan Keuangan.</p>
3.	Laporan Realisasi Anggaran.	Diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan.	Tetap diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan.
4.	Laporan Perubahan SAL	Tidak ada laporan sendiri	<p>Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo anggaran lebih awal 2. Saldo anggaran lebih 3. Sisa lebih/ kurang pembiayaan 4. Anggaran tahun berjalan 5. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain. 6. Saldo anggaran lebih akhir.
5.	Neraca	<p>Akun ekuitas disebut sebagai ekuitas dana yang terbagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekuitas dana 	Tidak lagi disebut ekuitas dana, hanya ekuitas yaitu kekayaan bersih

		<p>lancer</p> <p>2. Ekuitas dana investasi</p> <p>3. Ekuitas dana cadangan</p>	<p>pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca bersal dari saldo ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.</p>
6.	Laporan Arus Kas	<p>1. Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.</p> <p>2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi. Investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.</p>	<p>1. Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.</p> <p>2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi. Investasi aset non keuangan. Pembiayaan dan non anggaran.</p>
7.	Laporan kinerja keuangan / laporan operasional.	<p>1. Bersifat opsional.</p> <p>2. Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual.</p>	Merupakan keuangan pokok
8.	Laporan perubahan ekuitas.	Bersifat opsional	Merupakan laporan keuangan pokok.
9.	Catatan atas laporan keuangan.	1. Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai	1. Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA,

		<p>referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>2. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK.</p>	<p>Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>2. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Indonesia

a. Dasar Akuntansi Pendapatan

Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang terdiri dari beberapa rangkaian yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan. Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus masuk yang melekat dari suatu aset dan meningkatnya nilai net aset yang menjadi partisipasi hak.¹³ Dalam konsep islam, istilah pendapatan biasanya digunakan untuk menyatakan penghasilan (*revenue*) dalam kerangka dasar untuk penyajian dan penyusunan laporan laba rugi. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh atas kegiatan-kegiatan perusahaan dalam satu periode. Pendapatan menjadi sangat penting karena

¹³Syahman Sitompul, dkk, *Akuntansi Masjid* (FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 71.

pendapatan merupakan objek atas kegiatan perusahaan. Maka untuk itu, setiap perusahaan selalu menguahkan secara maksimal akan barang/jasa yang diproduksinya untuk mencapai pendapatan yang maksimal. Dalam surah Al-Qhasas ayat 77 menjelaskan:

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Artinya: “Dan carilah apa yang telah diangerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) Negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.¹⁴

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu mencari bekal untuk kehidupan kekal di akhirat, dengan tidak melupakan bahagia kenikmatan di dunia. Artinya, selain ibadah, manusia tetap diharuskan mencari penghasilan di dunia untuk ketentraman hidupnya yang berupa pendapatan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupan di dunia. Pendapatan dapat diperoleh dengan mencari pekerjaan ataupun dengan berniaga dan membuka usaha. Pendapatan yang diperoleh hendaklah dapat diatur dengan baik oleh setiap orang agar tidak mengalami kerugian dimasa mendatang.

Dasar Akuntansi Sektor Publik terdiri atas akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dimana kegiatan akuntansi tersebut berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyediakan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menganut basis akuntansi akrual sedangkan penganggaran pemerintah disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Hal ini mengakibatkan adanya dua jenis pelaporan terkait penggunaan sumber daya ekonomis suatu entitas, yaitu Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi

¹⁴Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid* Kode Angka, h. 395

Anggaran (LRA). Adanya dua jenis laporan tersebut berdampak pada pendapatan yang harus dilaporkan oleh pemerintah pusat.

Paragraf 8 Lampiran 102 PSAP 01 mendefinisikan pendapatan-LO sebagai hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sementara itu, pendapatan-LRA didefinisikan sebagai semua pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Salah satu komponen akuntansi berbasis akrual adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dalam suatu entitas. Pendapatan dalam akuntansi pemerintahan terdiri dari:

1) Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan-LO)

Pendapatan Laporan Operasional selanjutnya disingkat Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Dengan kata lain, pendapatan dapat diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah dipenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Bila diringkaskan, pengakuan pendapatan-LO dapat diakui saat:

- a) Pendapatan-LO berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- b) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- c) Pendapatan-LO yang hak telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan diakui saat direalisasi.

Lebih lanjut Pernyataan Standar Akutansi Pemerintahan(PSAP)

12 menyatakan bahwa, “Pendapatan-LO menggunakan nilai perolehan historis dan mengklasifikasikan pendapatan menurut sumber pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah”. Akutansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan atas bruto dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Perlakuan koreksi dan pengembalian pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama sedangkan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2) Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran(Pendapatan-LRA)

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat Pendapatan-LRA diakui pada saat adanya penerimaan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan kata lain, pendapatan diakui saat kas diterima di Rekening Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan nilai perolehan historis dan menggunakan mata uang rupiah.

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yakni membukukan pendapatan secara bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan LRA yang terjadi pada periode pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama sedangkan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3. Kebijakan Akutansi Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat

Kebijakan akuntansi pendapatan menjelaskan definisi pengakuan pendapatan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, dan ilustrasi jurnal yang meliputi pendapatan LO dan LRA (PMK 219/PMK.05/2013). Salah satu jenis pendapatan yang harus disajikan, baik dalam bentuk LO maupun LRA adalah pendapatan perpajakan. Banyaknya jenis pajak dan aturan yang mendasarinya membawa konsekuensi bervariasinya saat pengakuan dan terutangnya pendapatan perpajakan.

Adapun mekanisme pengakuan pendapatan perpajakan yang digunakan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 219/PMK.05/2013 menyatakan bahwa, “Pengakuan pendapatan perpajakan-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan, yaitu *self assessment* dan *official assessment*”. Pada metode *self assessment*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengakui pendapatan perpajakan-LO saat realisasi kas diterima di kas Negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan dengan dokumen sumber berupa pemberitahuan pabean dan cukai atau dokumen pelengkap pabean mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Pada metode *official assessment*, pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan tersebut, yaitu pada saat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan-LO.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan perpajakan-LO pada periode pendapatan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian. Baik metode *self assessment* dan *official assessment* mengukur pendapatan perpajakan

dengan asas bruto menggunakan nilai nominal, yaitu sebesar nilai kas masuk yang telah diterima pemerintah.

Dalam hal penyajian dan pengungkapan, entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dengan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang Rupiah dan bila dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi. Pencatatan transaksi terkait dengan pendapatan-LO dijelaskan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Jurnal Pengakuan Pendapatan-LO

Jenis pendapatan	Kejadian	Jurnal
Pendapatan yang diterima secara tidak langsung	Ketika terbit surat ketetapan atas pendapatan	Piutang xxx- Pendapatan Negara dan hibah -xxx <i>(dicatat pada buku besar akrual)</i>
	Saat pelunasan piutang	Diterima dari Entitas lain xxx- Piutang -xxx <i>(dicatat pada buku besar akrual)</i>
		Diterima dari Entitas lain xxx- Pendapatan Negara dan hibah -xxx <i>(dicatat pada buku besar kas)</i>
Pendapatan yang diterima secara/pelunasan surat ketetapan pada hari yang sama dengan	Saat pendapatan diterima kasnya	Diterima dari Entitas lain xxx- Pendapatan Negara dan hibah -xxx <i>(dicatat pada buku besar kas dan buku besar akrual)</i>

tanggal terbitnya surat ketetapan		akrual)
--------------------------------------	--	---------

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor: 219/PMK.05/2013

b. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara. Pendapatan ini diperlakukan sebagai penambah Saldo Anggaran Lebih yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan perpajakan-LRA diukur menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas Negara. Pengukuran pendapatan perpajakan-LRA menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah dan apabila masih menggunakan mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi. Pencatatan transaksi terkait dengan pendapatan-LRA dijelaskan pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Jurnal Pengakuan Pendapatan-LRA

Kejadian	Jurnal	Keterangan
Saat pendapatan-LRA diterima kasnya	Diterima dari entitas lain xxx- Pendapatan Negara dan hibah -xxx	Buku besar akrual dan buku besar kas

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 219/PMK.05/2013

4. Sistem Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.05/2013 membagi pencatatan sistem akuntansi pendapatan pemerintah pusat menjadi dua, yaitu pencatatan pada buku besar akrual dan buku besar kas. Kedua pencatatan tersebut menggunakan jurnal akuntansi berupa jurnal standar yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dan jurnal

detail berdasarkan urutan waktu yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar.

Penjelasan mengenai kedua pencatatan sistem akuntansi pendapatan tersebut dijabarkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jurnal Pencatatan Pendapatan Perpajakan

Jenis pendapatan	Kejadian	Jurnal
Pendapatan yang diterima secara tidak langsung	Ketika mencatat terjadinya piutang	Piutang pendapatan xxx- Pendapatan -xxx <i>(dicatat pada buku besar akrual)</i>
	Saat mencatat pelunasan piutang	Diterima dari Entitas lain xxx- Piutang pendapatan -xxx <i>(dicatat pada buku besar akrual)</i>
Pendapatan yang diterima secara langsung	Saat mencatat penerimaan kas tanpa didahului piutang	Diterima dari Entitas lain xxx- Pendapatan -xxx <i>(dicatat pada buku besar kas dan buku besar akrual)</i>
	Saat mencatat penerimaan kas dengan/tanpa didahului piutang	Kas xxx- Diterima dari Entitas lain -xxx <i>(dicatat dalam buku besar akrual)</i>
	Saat mencatat penerimaan kas dari pendapatan perpajakan	Diterima dari Entitas lain xxx- Pendapatan -xxx <i>(dicatat dalam buku besar kas)</i>

		Kas xxx- Diterima dari Entitas lain -xxx <i>(dicatat dalam buku besar kas kuasa BUN)</i>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.05/2013.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.05/2013 juga mengatur mengenai jurnal standar penyesuaian yang digunakan pada saat akhir periode pelaporan yang dilakukan oleh satuan kerja. Jurnal standar penyesuaian yang terkait dengan pendapatan adalah jurna standar pendapatan diterima dimuka. Jurnal standarpenyesuaian tersebut dicatat dalam buku besar akrual. Adapun jurnal standar penyesuaian tersebut dijelaskan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Jurnal Pengakuan Pendapatan Perpajakan

Kejadian	Jurnal	Keterangan
Saat mencatat pendapatan diterima dimuka dan penyesuaian jumlah pendapatan yang belum menjadi hak sampai akhir periode pelaporan	Pendapatan xxx- Pendapatan diterima dimuka -xxx	Digunakan untuk metode/pendekatan pendapatan dalam pencatatan pendapatan diterima dimuka
Saat mencatat pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan	Pendapatan diterima dimuka xxx- Pendapatan -xxx	Digunakan untuk metode/pendekatan kewajiban dalam pencatatan pendapatan diterima dimuka

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.05/2013.

5. Perbandingan Basis Kas dengan Basis Akrual

a. Akuntansi Berbasis Kas

Akuntansi berbasis kas merupakan basis yang secara tradisional digunakan oleh pemerintah diberbagai Negara. Pengakuan dan pengukuran dilakukan berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Adapun kelebihan akuntansi berbasis kas adalah sebagai berikut:

- 1) Relative sederhana
- 2) Mudah dipahami dan dilaksanakan
- 3) Proses audit lebih mudah
- 4) Memudahkan dalam pengendalian belanja.¹⁹

Sedangkan kekurangan berbasis kas adalah sebagai berikut:

- 1) Rentan manipulasi arus kas
- 2) Mendorong kecenderungan belanja sampai anggaran habis
- 3) Tidak ada pengendalian aset nonkas secara terkoordinasi melalui akuntansi
- 4) Aset terabaikan atau tidak digunakan dengan efektif
- 5) Tidak memfasilitasi hubungan antara analisis ekonomis dengan output organisasi
- 6) Tidak menggambarkan beban keuangan yang sebenarnya terutama beban penyusutan aset tetap
- 7) Tidak mampu menghasilkan neraca sehingga Negara tidak pernah mengetahui posisi resiko keuangan (*blind spot accounting*).

b. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual

Basis akuntansi ini merupakan sesuatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan undang-undang dan disesuaikan dengan kondisi (peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta kemampuan Sumber Daya Manusia) di Indonesia yang sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan akuntansi tradisional (*single entry*) berbasis kas, belum menggunakan akuntansi

¹⁹Riyanto dan Agus Puji, *Akuntansi Pemerintah*, h. 10-11

modern (*double entry*) sehingga sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bila langsung menerapkan akuntansi modern berbasis akrual. Basis Kas Menuju Akrual relative tidak dikenal di Negara-negara lain, yang merupakan pendekatan transisi dari kas menuju akrual yang berhasil.

Kelebihan akuntansi kas menuju akrual adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan undang-undang
- 2) Pemerintah telah dapat mengimplementasikan relatif cukup baik
- 3) Telah menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem.

Adapun kekurangan akuntansi kas menuju akrual adalah sebagai berikut:

- 1) Belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan (hanya focus pada sumber daya keuangan berupa kas-*financial assets*).
- 2) Tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya.
- 3) Kurang memberikan jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas. Hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan Negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003.
- 4) Informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodic yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan). Jika sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem (*by sistem*).

c. Akuntansi Berbasis Akrua

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut. Tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.²⁰

Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akrua basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu:

- 1) Pengakuan pendapatan Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.
- 2) Pengakuan beban
Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.²¹

Adapun kelebihan akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut:

²⁰Intan Safrina Utami S, *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur pemukiman Sumatera Utara*, (Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Medan, 2012), hal. 12.

²¹Jan Hoesada, *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 14

- a) Menghasilkan laporan keuangan lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena memenuhi azas “semakin baik informasi, maka semakin baik keputusan”.
- b) Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat.
- c) Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah.
- d) Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik.
- e) Pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik.
- f) Sesuai Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-undang.
- g) Sesuai dengan *international best practices*, termaksud untuk *kebutuhan Government Finance Statistics (GFS)* yang berbasis akrual.
- h) Mengakumulasi kewajiban pembayaran pension.
- i) Menyelaraskan/meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan’
- j) Mewaspadaai risiko default utang yang akan jatuh tempo bersanksi denda.
- k) Memungkinkan perundingan dan penjadwalan ulang yang mungkin tak mampu dibayar dimasa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa.
- l) Memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan Negara dari sekedar kas
- m) Mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel.²²

Adapun kelemahan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai berikut:

²²Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 315

- a) Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
- b) Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas.
- c) Dalam perbandingan dengan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit.
- d) Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.²³

d. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Secara umum, pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi akrual karena basis akrual memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
- 3) Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.²⁴

6. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Teknologi informasi adalah suatu yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintahan daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap OPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat digunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses

²³ *Ibid.*, h. 120.

²⁴ Renny Maisyarah dan Heny Triastuti Kurnia Ningsih, *Akuntansi Sektor Publik* (Medan: Fekon Press, 2019), h. 98.

pengambilan keputusan. Disisi lain pihak Legislatif dapat menggunakan untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintahan daerah.

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

7. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Program aplikasi komputer SIMDA adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membentuk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, PEMDA dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporan.

a. Keunggulan dan Manfaat Menggunakan SIMDA

1) Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2) Terintegrasi

Aplikasi SIMDA dapat di implementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi menggunakan teknologi *Multi User* dan teknologi *Client/Server*, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan baik

dilaksanakan SKPKD maupun di SKPD, sehingga mempunyai keuntungan:

- a) Pengendalian transaksi terjamin
- b) Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- c) Cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan.

3) *Transfer Of Knowledge*

Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam hal:

- a) Penguasaan disiplin ilmu akuntansi dan audit.
- b) Penguasaan *business process* pengelolaan keuangan daerah.
- c) Pengalaman praktis pengelolaan keuangan daerah.

Serta didukung dengan Kantor Perwakilan BPKP yang dapat menjangkau seluruh pemerintahan daerah, maka BPKP dapat membimbing dan mengasistensi pengelolaan keuangan daerah untuk mengimplementasi sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Bimbingan dan asistensi tersebut merupakan proses *transfer of knowledge* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah daerah.

4) Kesiambungan Pemeliharaan

Dengan komitmen dan dukungan dari pimpinan dan eksistensi BPKP maka pengembang dan perbaikan aplikasi SIMDA masih terus dilakukan meliputi:

- a) Penyempurnaan dan perbaikan aplikasi SIMDA mengikuti praktik pengelolaan terbaik
- b) Penyesuaian dengan peraturan yang terbit.
- c) Penerimaan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang mengimplementasikannya.

5) Mudah Digunakan

Aplikasi SIMDA menampilkan fitur-fitur sederhana, mudah dimengerti dan dipelajari. Dengan melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah sehari-hari menggunakan aplikasi ini (output dokumentasi transaksi seperti : Surat Penyedia Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), secara otomatis catatan dan laporan keuangan dapat dihasilkan (output catatan akuntansi seperti buku jurnal. Buku besar, dan laporan lainnya).

b. Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tabel 2.6
Perkembangan Aplikasi SIMDA

No.	Program
1.	Program Aplikasi SIMDA Keuangan
2.	Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
3.	Program Aplikasi SIMDA Gaji
4.	Program Aplikasi SIMDA Gaji
5.	Program Aplikasi Display SPP s.d SP2D
6.	Program Aplikasi Gabungan Per Provinsi
7.	Program Aplikasi Rekonsiliasi Bank

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menambah informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki bahasan relevan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Alexander (2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Melakukan penelitian mengenai penerapan standar	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya

		Berbasis Akrua l Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung.	akuntansi pemeritahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan.	adalah objek penelitianny a.
2	Fitria Ayu Lestari Niu (2014)	Analisis Penerapan PP.No.71Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotambagu.	Melakukan penelitian mengenai penerapan standar akuntansi pemeritahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitianny a.
3	Daholi (2015)	Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua (Studi Kasus: KPP Pratama Medan Kota).	Melakukan penelitian mengenai standar akuntansi pemeritahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan	Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah objek penelitianny a.
4	Mitami Dian (2013)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	Melakukan penelitian mengenai Sistem Informasi Manajemen Daerah	Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah objek penelitianny

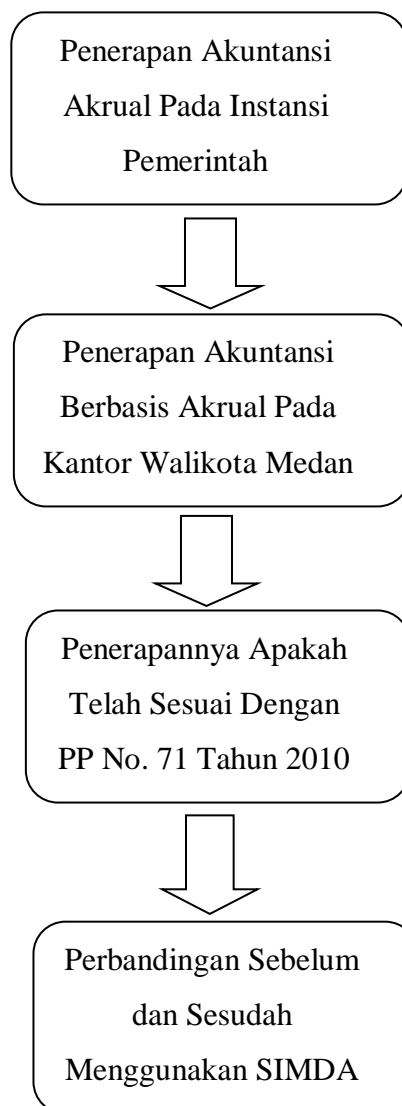
		Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep	(SIMDA) terhadap laporan keuangan.	a.
5	Siska Florida Simorangkir (2016)	Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan).	Melakukan penelitian mengenai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap laporan keuangan.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah objek penelitiannya a.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini didasarkan pada landasan teori dan latar belakang masalah yang diuraikan pada bab 1. Menurut Sugiyono, “kerangka konseptual adalah tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mewajibkan seluruh pemerintah pusat maupun daerah menerapkan

akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya. Hal berikut yang mendasari Kantor Walikota Medan menerapkan Akuntansi berbasis akrual.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Selama ini pemerintah masih menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual yang berlandas pada peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa pendapatan perpajakan diakui ketika kas masuk ke Rekening Negara. Penerapan basis kas ini memudahkan pencatatan dan pelaporan pendapatan pajak karena hanya berdasarkan pada pendapatan pajak tahun fiskal

tertentu tanpa memperhatikan kapan sebenarnya pendapatan tersebut dihasilkan. Namun, hal ini menimbulkan kelemahan karena pendapatan yang dilaporkan menjadi kurang mempersentasikan keadaan sebenarnya sehingga pelaporannya menjadi kurang handal dan akuntabel. Namun, sejak diterbitkannya standar akuntansi berbasis akrual tersebut, pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel mulai semakin membaik. Hal tersebut tercermin dari laporan keuangan yang disajikan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.¹

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.²

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif sebagai alat untuk mengetahui makna yang sebenarnya dengan implementasi yang diterapkan oleh Kantor Walikota Medan tersebut. Oleh karena itulah penelitian akan berusaha untuk mencari dan pengumpulan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada, dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena diselidiki.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Kantor Walikota Medan, Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos 20112. Di kantor inilah peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai analisis data-data untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrua Dalam Menyusun Laporan Keuangan telah diterapkan sesuai dengan konseptual atau hanya sekedar teori saja.

¹ Arfan Ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka, 2014), h. 35.

²*Ibid.*, h. 36.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2019-2020							
		Nov 2019	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agust2 020	Sept 2020	Okt 2020	Feb 2021
1.	Pengaju an Judul Skripsi								
2.	Bimbing an Proposal Skripsi								
3.	Seminar Proposal								
4.	Bimbing an Skripsi								
5.	Sidang Munaqa sah								

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek peneliat adalah subjek yang ditunjuk untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi ang digali untuk mengunkap fakta-fakta di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Pelaporan bidang Akuntansi

(Dedy Syahputra), Staf Sub Bidang Pembukuan bidang Akuntansi (Darman), dan Staf Sub Bidang Pajak Bidang Kas (Melly Rangkuti).

Tabel 3.2
Data Subjek Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Bidang
1.	Dedy Syahputra	Kepala Sub Bidang	Akuntansi
2.	Dirman	Anggota/Staf	Akuntansi
3.	Melly Rangkuti	Anggota/Staf	Kas

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek pada penelitian ini adalah Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrua dalam Menyusun Laporan Keuangan Kantor Walikota Medan tahun 2015-2019.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata-perkata. Data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan pada analisis statistik.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan atau kontak langsung antara si peneliti

dengan Responden.⁴ Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara pada bagian yang terkait dalam Kantor Walikota Medan.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang sudah tersedia, dan peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari berupa data yang diambil langsung ke Kantor Walikota Medan.

Penelitian ini berupa wawancara dan juga berupa gambaran umum dari Pemerintahan Kota Medan dan gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang bersumber dari website pemukomedan.go.id dan data yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Kantor Walikota Medan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada subbab ini penulis akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan survey lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara)

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi sehubungan dengan penerapan sistem akuntansi pendapatan berbasis akrual yang sebenarnya pula.

- b. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku dan jurnal ilmiah untuk mendapatkan referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

⁴*Ibid*, h. 122.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵

Menurut Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan: penarikan/ verifikasi.⁶

Penjelasan masing-masing tahapan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

⁵*Ibid*, h. 295.

⁶*Ibid*, h. 295

Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat tahapan tersebut saling mempengaruhi dan terkait antara satu dan yang lainnya. Setelah data dari lapangan terkumpulan dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka penelitian akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif merupakan suatu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Langka-langka analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui pengamatan, wawancara dengan para informan dilengkapi dengan dokumen yang ada kemudian penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Analisis ini dilakukan dengan klarifikasi, melakukan wawancara kemudian data-data yang diperoleh ditelaah dengan disertai alasan-alasan yang logis dan relevan, sehingga tetap mengacu pada referensi-referensi yang digunakan.

Setelah menelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dilakukan sambil membuat coding. Tahap akhir dari analisa data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah data hasil sementara menjadi teori substantive dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data-data yang diperoleh selama penelitian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut sehingga, memberikan informasi yang lengkap sehingga memberikan gambaran dan hubungan yang jelas terhadap rumusan permasalahan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar dalam memberikan saran kepada instansi.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Medan

1. Sejarah Singkat Pemerintahan Kota Medan

Pemerintahan Kota Medan berdiri berdasarkan UU Darurat No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan Kota Medan beraktivitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus Kota di Provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi, dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai Barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan kota, khususnya setelah melalui fase kritis (2002-2004) memiliki kinerja yang menggembirakan, berdasarkan indikator-indikator yang dapat diamati, keluaran, hasil, manfaat dan dampak pembangunan kota pada periode tersebut, cenderung cukup berarti, bahkan dapat dianggap efektif efisien, meningkatkan kesejahteraan warga kota.

Pemerintahan Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu mengalih, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus mengalih, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka dibagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/Negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia,

Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relative besar dimana tahun 2007 telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tersier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional Nasional.

a. Geografi dan Demografi

Karakteristik Kota Medan didukung oleh luas wilayah 265,10 km² atau 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, dan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, barat, serta selatan. Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Memiliki posisi strategis yang mungkin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota.

Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan. Berdasarkan batas wilayah administratif, Kota Medan relatif kecil disbanding kota lainnya, tetapi posisi secara ekonomi regional Kota Medan sangat penting karena berada dalam wilayah hinterland dengan basis ekonomi sumber daya alam yang relatif besar dan beragam, serta dukungan kepelabuhanan.

Dibanding kota besar lainnya, Kota Medan memiliki keterbatasan ruang sebagai akibat bentuk wilayah administratif yang ramping ditengah. Dengan keterbatasan ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal terutama hambatan alamiah dalam pengembangan wilayah utara Kota Medan, khususnya dalam penyajian prasarana dan sarana perkotaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang seimbang dan kurang terpadunya penataan ruang kota dibagian utara dan bagian selatan.

b. Lambang Kota Medan



Gambar 4.1

Lambang Kota Medan

Makna dari lambang Kota Medan di atas adalah sebagai berikut:

1. 17 biji padi berarti 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. 8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. 4 tiang dan 5 bahagian dari perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi Indonesia.
4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing berarti Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.
5. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan.
6. Lima sinar bintang berarti lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari Kota Medan dan lima bahagian perisai berarti Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

c. Visi dan Misi

Visi Kota Medan adalah **“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humaris, Sejahtera dan Religius”**.

Misi Kota Medan adalah sebagai berikut:

1) Kerjasama

Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2) Kreatifitas dan Inovasi

Meningkatkan efesiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

3) Kebhinekaan Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

4) Penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

5) Multikulturalisme

6) Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

7) Tata Ruang Kota yang Konsisten

Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yng semakin modern dan berkelanjutan.

8) Penigkatan Kesempatan Kerja

Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan keadilan.

9) Smart City

Mengembangkan Medan sebagai *smart city*.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan

a. Sejarah Singkat

Dahulu Badan Pengelolaan Daerah masih berupa unit yang sangat kecil yaitu bagian sekretariat daerah Kota Medan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintahan Kota Medan. Dimana pada saat itu tugas pengelolaan keuangan pemerintahan Kota Medan belum begitu lengkap yang terdiri dari 5 sub bagian yaitu Anggaran, Perbendaharaan, Gaji, Verifikasi dan Pembukuan.

Seiring perkembangan dan laju perkembangan penduduk Kota Medan, maka melalui peraturan daerah Kota Medan bagian diatas ditingkatkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang tugas utamanya mengelola keuangan pemerintahan Kota Medan. Yang sekarang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana perkembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional pengawasan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintahan Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan prosedur keuangan yang ada.

Kantor Pemeritahan Kota Medan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beralamatkan jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos 20112.

b. Visi dan Misi

1) Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif, onovatif, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Medan dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kota Medan secara dimensional yang berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Kinerja dan peran Aparatur sangat menentukan keberhasilan visi Pemerintahan Kota Medan.

Adapun keinginan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik yang didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur. Secara garis besar Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yaitu: *“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang Profesional Berwawasan Manajemen Pengelolaan Keuangan yang Sistematis, Efisien dan Efektif”*.

Dari Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan diatas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut:

- a) Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Profesional

Pelayanan administrasi yang profesional merupakan unsure yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengaturan/regulasi maupun fungsi rangka menumbuhkembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini, untuk memungkinkan Pemerintahan Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh Pemerintahan Kota Medan adalah sumber daya aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan administrasi.

b) Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kota Medan yang Berwawasan Manajemen Pengelolaan Keuangan

Dimana sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus merespon tuntutan dan harapan masyarakat yang akan berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Hal tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi aparturnya sehingga akan memungkinkan pemerintahan dan masyarakat Kota Medan mampu mencapai keberhasilan pembangunan kota sebagaimana visi dan misi yakni “Medan Kota yang Berdaya Saing, Nyaman, Peduli dan sejahtera”.

c) Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kota Medan yang Berpengabdian

Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dari itu profesionalisme sumber daya aparatur

yang akan diwujudkan tersebut tidak hanya membangun kualitas, kompetensi, menguasai ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan Negara melalui pembangunan daerahnya. Dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antara daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja kearah yang lebih baik kedepannya serta meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

d) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena itu peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompeten, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi sehingga meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan.

e) Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Medan sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintah yang baik

Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan pelaporan.

2) Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Dalam mewujudkan visi diatas diperlukan beberapa misi yang merupakan titik konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi pedoman dalam

melaksanakan tugas pemerintah. Adapun Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

a) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan bagi aparatur sebagai Aparatur Pemerintahan Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil sesuai dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) Meningkatkan Transparansi, Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah khususnya Berkualitas, Transparansi, Efisien dan Efektif.

c) Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Teknologi yang Lebih Baik

Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau dan adil maka pada prakteknya tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Maka motivasi, disiplin dan kualitas sumber aparatur sangat dibutuhkan untuk mendukung penerapan penyelenggaraan pengelola keuangan yang baik.

d) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan

Dalam pencapaian tujuan organisasi kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan selain adanya peran penting dari faktor-faktor lain. Peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan.

Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karir dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkolerasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan wajib harus dilakukan.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antar setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisah kegiatan lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi.

Adapun fungsi/kegunaan dari struktur dalam sebuah organisasi, yaitu:

- a. Kejelasan Tanggung Jawab
- b. Kejelasan Kedudukan
- c. Kejelasan Mengenai Jalur Hubungan
- d. Kejelasan Uraian Tugas

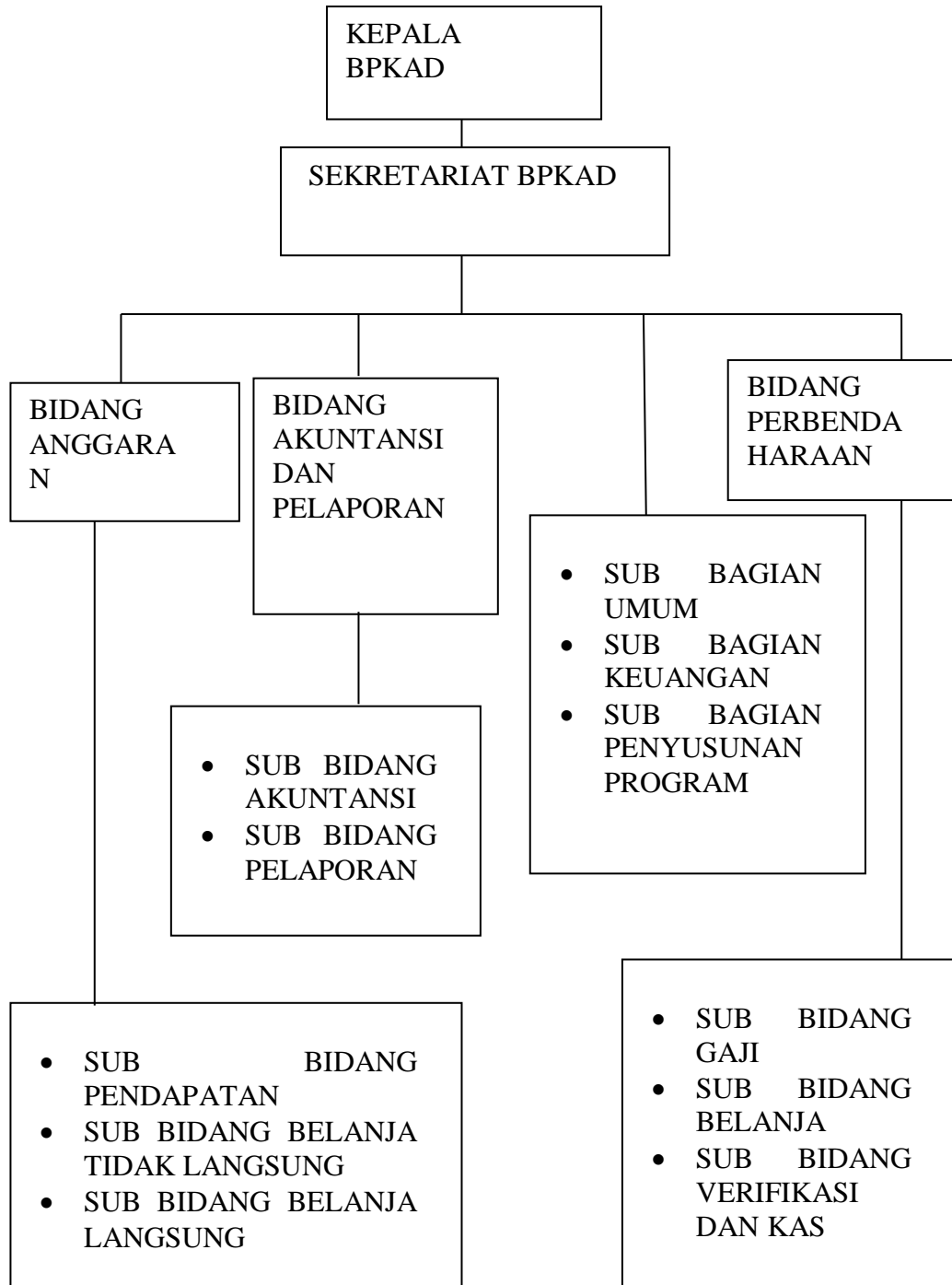
Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan

- c. Sub Bagian Penyusunan Program
- 3. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pendapatan
 - b. Sub Bagian Belanja Tidak Langsung
 - c. Sub Bagian Belanja Langsung
- 4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian gaji
 - b. Sub Bagian Belanja
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Kas
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pelaporan
 - b. Sub Bidang Akuntansi
- 6. Unit Pelaksanaan Teknis
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi dibuat agar penempatan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing, dan juga agar semua karyawan dapat diatur dengan baik dengan memberikan kepala pimpinan di setiap sub bidangnya. Pemimpin bertugas untuk mengatur dan membimbing bawahannya dengan baik agar kerjasama antar karyawan berjalan dengan benar.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WALIKOTA MEDAN



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Kantor Walikota Medan

Setiap anggota dari sebuah organisasi tidak lepas dari tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Begitu juga pada setiap pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kantor Walikota Medan. Adapun tugas dan wewenang dari setiap pegawai di BPKAD Kantor Walikota Medan adalah sebagai berikut:

A. Kepala BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.

Kepala BPKAD Menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan.
4. Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan, dan penanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat BPKAD

1. Penyusunan rencana, dan kegiatan sekretariat.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumah tanggan BPKAD.
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan.
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bdan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (BPKAD).
6. Pelaksaaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang kesekretariatan.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariatan menyatakan:

a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum.

Sub Bagian Umum Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum.
2. Penyusunan bahan pertunjukan teknis pengelolaan administrasi umum.
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan, kerumah tanggaan dan keprotokolan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kelembagaan, keterlaksanaan dan kepegawaian.
6. Pelaksanaan hubungan masyarakat.

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Sub Bagian Keuangan Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Keuangan.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi.
4. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
5. Penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
6. Pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
7. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program.
2. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program, dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
4. Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKAD.
5. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Bidang Anggaran Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Anggaran.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung.
3. Pengkoordinasi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).
4. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana APBD dan Perubahan APBD atas susulan SKPD.
6. Penyiapan bahan pengesahan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
7. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai DPA/DPPA SKPD.
8. Penyusunan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
9. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran.
10. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran, membawahkan:

a. Sub Bidang Pendapatan

Sub Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan.

b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja tidak langsung.

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
2. Pengkoordinasian RAK belanja tidak langsung SKPD.

3. Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD.
4. Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD.
5. Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD.
6. Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung.
7. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Belanja Langsung

Sub Bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup belanja langsung.

Sub Bidang Belanja Langsung Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung.
3. Pengkoordinasian RAK belanja langsung SKPD.
4. Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja langsung SKPD.
5. Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA belanja langsung SKPD.
6. Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD.
7. Penyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung.

8. Penyusunan laporan anggaran kinerja program bidang anggaran lingkup belanja langsung.
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perbendaharaan BPKAD

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas.

Bidang Perbendaharaan Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perbendaharaan.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang gaji, belanja, verifikasi dan kas.
4. Penyiapan SP2D Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengeluaran Pembiayaan.
5. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas.
6. Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengeluaran Pembiayaan.
7. Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD.
8. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan.
9. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
10. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan, membawahkan:

a. Sub Bidang Gaji

Sub Bidang Gaji dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji.

Sub Bidang Gaji Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Gaji.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai.
3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang gaji.
4. Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari SKPD.
5. Penyiapan bahan penerbitan SP2D gaji.
6. Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD.
7. Penyelesaian permasalahan lingkup gaji.
8. Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia.
9. Penyusunan laporan realisasi SP2D Gaji.
10. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbedaharaan lingkup gaji.

b. Sub Bidang Belanja

Sub Bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Sub Bidang Belanja Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja.
3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang belanja.
4. Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dari SKPD.

5. Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja.
6. Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencair Dana (SP2D) belanja.
7. Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
8. Penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja.
9. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja.
10. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup belanja.

c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas

Sub Bidang Verifikasi dan Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah an bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang Verifikasi dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan.

Sub Bidang Verifikasi dan Kas Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Kas.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verifikasi dan kas.
3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang verifikasi dan kas.
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang verifikasi dan kas.
5. Penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas.
6. Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja.
7. Pelaksanaan pembinaan terhadap bendahara SKPD.
8. Penyusunan laporan arus kas secara periodik.
9. Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode.
10. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verifikasi dan kas.

E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD lingkup akuntansi dan pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan.
4. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi, dan asistensi sistem penatausahaan akuntansi dan pelaporan.
5. Pengkoordinasikan laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan.
7. Penatausahaan pembukuan keuangan pemerintahan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah.
8. Penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:

a. Sub Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi.

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan lingkup akuntansi.
3. Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit.
4. Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam rangka pengelolaan anggaran kas.
5. Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pendapatan.
6. Pengesahan surat pertanggung jawaban pendapatan.

b. Sub Bagian Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bidang Pelaporan.

Sub Bidang Pelaporan Menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup pelaporan.
3. Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah.
4. Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD).
5. Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksanaan secara integrasi.
6. Penyusunan laporan keuangan tahunan.

F. Unit Pelaksana Teknis BPKAD

Pembentukan, tugas pokok, dan fungsi unit pelaksana teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

G. Kelompok Jabatan Fungsional BPKAD

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga kerja tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Kantor Walikota Medan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA.

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di Bab 1 berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA. Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan bapak Dedy Syahputra selaku kepala sub bidang pelaporan bidang akuntansi pada tanggal 10 November 2020: “Kantor Walikota sudah menggunakan SIMDA pada saat PP No. 71 diterapkan. Setelah menggunakan SIMDA terdapat beberapa perbedaan komponen laporan keuangannya. Sebelum menggunakan SIMDA komponen laporan keuangan Kantor Walikota Medan ada 5, dan pada saat itu Kantor Walikota Medan masih memakai basis kas. Dan setelah

menggunakan SIMDA komponen laporan keuangannya bertambah menjadi 7 dan sudah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010”.

2. Penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Kantor Walikota Medan sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Berlakunya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanahkan oleh paket Undang-Undang keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dedy Syahputra selaku kepala sub bidang pelaporan bidang akuntansi pada tanggal 10 November 2020: “Akuntansi pendapatan berbasis akrual sudah diterapkan pemerintah sejak tahun 2015. Kantor Walikota Medan juga sudah menerapkannya sejak tahun 2015 tetapi belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dikarenakan masih banyaknya kendala dalam penerapannya. Sejak tahun 2017 penerapan akuntansi berbasis akrual sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 hingga sekarang. Menurut saya pribadi menggunakan basis akrual lebih rumit dibandingkan menggunakan basis kas terutama dulu kita hanya memakai 5 komponen laporan keuangan sekarang jadi 7 komponen laporan keuangan dan manfaatnya untuk publik belum bisa dirasakan. Pada saat pencatatan lebih simpel dan lebih mudah dipahami dengan menggunakan basis kas. Sedangkan untuk pelaporan lebih enak dan lebih mudah menggunakan basis akrual”.

3. Kendala bagi Kantor Walikota Medan dalam menerapkan PP No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam menggunakan SIMDA.

Pemerintah Kota Medan menggunakan Aplikasi SIMDA yang dikeluarkan oleh BPKP dalam pengelolaan keuangan daerah guna menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan mendapat penilaian auditor dari pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa opini audit, dalam rangka mengemban amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 maka Pemerintah Kota Medan memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dedy Syahputra selaku kepala sub bidang pelaporan bidang akuntansi pada tanggal 10 November 2020: “Faktor pendukung dan penghambat penggunaan aplikasi SIMDA dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Kantor Walikota Medan. Kantor Walikota Medan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, semuanya tidak lepas dari berbagai faktor-faktor pendukung dan penghambat penggunaan Aplikasi SIMDA. Faktor pendukungnya itu seperti peran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Komunikasi dan Komitmen. Sedangkan penghambatnya yaitu Sumber Daya Manusia dan Kesalahan teknis yang terjadi akibat gangguan jaringan yang menyebabkan data yang telah di input ke SIMDA tidak dapat tersimpan sehingga pegawai harus menginput data ulang. Gangguan jaringan juga menyebabkan user tidak dapat masuk ke SIMDA.

C. PEMBAHASAN

Tabel 4.1. Hasil Analisis
Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah
Menggunakan SIMDA

No.	Komponen Laporan Keuangan	Sebelum Menggunakan SIMDA	Sesudah Menggunakan SIMDA
1.	Laporan Realisasi Anggaran	Nilai yang disajikan hanya berupa Pagu Anggaran dan Belanja. Tidak terdapat Transfer dan Pembiayaan.	Nilai yang diperoleh dari selisih Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, dan Koreksi-koreksi Kesalahan.
2.	Neraca	Posisi Keuangan Entitas terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Ekuitas.	Menjelaskan posisi keuangan yang meliputi Aset, Keajiban dan Ekuitas secara lengkap
	Aset Lancar	Aset lancar yang dimiliki entitas yaitu Persediaan.	Kas dan Setara Kas, Piutang dan Perediaan.
	Aset Tetap	Terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, Jalan Irigasi dan Akumulasi Penyusutan.	Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, Jalan Irigasi dan Akumulasi Penyusutan.
	Aset Tak Berwujud	Software dan Amortisasi	Software, Merk Dagang, Licensi dan Amortisasi.
	Ekuitas	Akun Ekuitas di Neraca berasal dari Saldo Akhir Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.	Saldo Ekuitas berasal dari Saldo Akhir Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
3.	Laporan Arus Kas	Disajikan oleh unut yang memiliki fungsi perbendaharaan. Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas Operasi 2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 3. Aktivitas Pembiayaan 	Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas Operasi 2. Aktivitas Investasi 3. Aktivitas Pendanaan 4. Aktivitas Transitoris

		4. Aktivitas Non Anggaran	
4.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Tidak ada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo Anggaran Lebih tahun lalu 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 3. SiLPA/SiKPA 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 5. Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan
5.	Laporan Perubahan Ekuitas		
	Ekuitas Awal	Berasal dari Saldo Akhir Ekuitas periode tahun sebelumnya.	Berasal dari Saldo Ekuitas periode tahun sebelumnya.
	Surplus/Defisit-LO	Nilai berasal dari Surplus/Defisit-LO dalam Laporan Operasional.	Berasal dari nilai Surplus/Defisit-LO dalam Laporan Operasional.
	Saldo Anggaran Lebih	Nilai berasal dari Neraca Saldo.	
	Koreksi-koreksi Kesalahan	Nilai yang diperoleh dari selisih dari Ekuitas Awal dengan Ekuitas-LO dalam Neraca Saldo.	Koreksi kesalahan dari Persediaan, Nilai Revaluasi Aset Tetap dan Lain-lain.
	Ekuitas Akhir	Nilai yang diperoleh dari selisih Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Saldo Anggaran Lebih dan Koreksi-koreksi Kesalahan.	Nilai yang diperoleh dari selisih Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, dan Koreksi-koreksi Kesalahan.
6.	Laporan Operasional		
	Pendapatan-LO	Tidak terdapat pendapatan-LO yang disajikan dalam laporan keuangan SKPD baik	Berasal dari kegiatan operasional yaitu Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-

		Pendapatan Asli Daerah-LO, Transfer-LO, dan Pendapatan Lain-lain-LO.	LO, dan Pendapatan Lain-lain-LO. Berasal dari Pajak dan Retribusi, Dana Alokasi Khusus, dan Hibah dari Pemerintah Kota maupun Provinsi.
	Beban	Beban Operasi meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.	Akun Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, dan penurunan manfaat ekonomi Barang/Jasa. Beban berasal dari Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO	Nilai diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO.	Selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO.
	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO	Surplus berasal dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO.	Berasal dari Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar dan Surplus/Defisit Non Operasional Lainnya-LO.
	Surplus/Defisit-LO	Berasal dari selisih antara Surplus/Defisit Operasional dan Surplus/Defisit Non Operasioanl.	Selisih antara Surplus/Defisit Operasional dan Surplus/Defisit Non Operasional.
7.	Catatan Atas Laporan Keuangan		
	Umum	Menjelaskan maksud tujuan penyusunan laporan keuangan.	Laporan keuangan tujuan umum entitas.
		Gambaran lengkap profil Kantor Walikota Medan.	Entitas akuntansi pelaporan.
	Pengungkapan Kebijakan Akuntansi	Menjelaskan Basis Akuntansi yang digunakan dan Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.	Pengungkapan dan Pengukuran terkait Basis Akuntansi yang mendukung laporan keuangan.
	Pos-pos Laporan Keuangan	Penjelasan rinci tiap pos-pos laporan keuangan.	Menjelaskan tiap pos-pos dan akun yang digunakan dalam laporan keuangan

			secara rinci.
	Laporan Realisasi Anggaran	Tidak terdapat penerimaan yang dapat diakui sebagai pendapatan.	Menjelaskan rinci Pos-pos Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan.
		Tidak terdapat Transfer dan Pembiayaan.	
		Menjelaskan Pagu Anggaran dan Pos Belanja secara rinci yaitu Belanja Operasi, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.	
	Neraca	Meliputi pos Kas di Bendahara Pengeluaran, Persediaan, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Ekuitas.	Menjelaskan secara rinci Pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dibandingkan tahun sebelumnya.
		Menjelaskan Mutasi dari Persediaan dibandingkan tahun 2015.	Menjelaskan kenaikan penurunan persediaan dibandingkan tahun sebelumnya.
		Menjelaskan perolehan Tanah, Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan dan Irigasi, dan Akumulasi Penyusutan.	Menjelaskan Mutasi dari Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya.
		Menjelaskan perolehan Aset Tetap lainnya berupa Software SKPD dan Amortisasi.	Sesuai SAP No. 71 Tahun 2010 Software termasuk dalam Aset Tak Berwujud.
		Menjelaskan Mutasi Ekuitas dibandingkan tahun 2015.	Menjelaskan kenaikan penurunan Ekuitas dibandingkan tahun sebelumnya.
	Laporan Operasional	Belum menjelaskan Akun-akun dalam Laporan Operasional pada CALK.	Menjelaskan Saldo Pendapatan-LO dan Beban, Surplus/Defisit-LO dan Non Operasional.
	Laporan Perubahan Ekuitas	Belum menjelaskan Akun-akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada CALK.	Menjelaskan lengkap Pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit, Koreksi dan Ekuitas Akhir yang diperoleh.

	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya		
	-Temuan dan Tindak Lanjut	<p>Temuan Administratif yang sifatnya teguran akan segera ditindak lanjuti.</p> <p>Temuan berupa pengembalian uang ke Kas Daerah segera dilakukan penyetoran melalui Bank.</p>	Mengungkap kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan.
	-Rekening Pemerintah	Rekening rinci SKPD pada Bank	

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut. Tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Data Akuntansi berbasis akrual didapatkan peneliti dari data primer dengan terjun langsung dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan pegawai di Kantor Walikota Medan. Peneliti mendapatkan hasil bahwa adanya perbedaan Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual dalam Menyusun Laporan Keuangan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Walikota Medan sebelum menggunakan SIMDA dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu didapatkan hasil bahwa nilai yang disajikan hanya berupa Pagu Anggaran dan Belanja. Tidak terdapat Transfer dan Pembiayaan. Sedangkan pada saat sesudah menggunakan SIMDA Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan Pendapatan, Pagu Anggaran dan Belanja, Transfer dan Pembiayaan.

2. Neraca

Neraca di Kantor Walikota Medan sebelum menggunakan SIMDA dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu didapatkan hasil bahwa Posisi Keuangan Entitas terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Ekuitas. Sedangkan pada saat sesudah menggunakan SIMDA Neraca Menjelaskan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas secara lengkap.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Saldo Anggaran Lebih di Kantor Walikota Medan sebelum menggunakan SIMDA dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu didapatkan hasil bahwa tidak terdapat Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sedangkan pada saat sesudah menggunakan SIMDA Laporan Saldo Anggaran Lebih menjelaskan posisi laporan keuangan yang meliputi Saldo Anggaran Lebih tahun lalu, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, SiLPA/SiKPA, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas di Kantor Walikota Medan sebelum menggunakan SIMDA dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu didapatkan hasil bahwa Laporan Arus Kas disajikan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, Aktivitas Non Anggaran. Sedangkan pada saat sesudah menggunakan SIMDA Laporan Arus Kas disajikan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan umum. Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas di Kantor Walikota Medan sebelum menggunakan SIMDA dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti

yaitu didapatkan hasil bahwa Berasal dari Saldo Akhir Ekuitas periode tahun sebelumnya. Sedangkan pada saat sesudah menggunakan SIMDA Laporan Perubahan Ekuitas Berasal dari Saldo Ekuitas periode tahun sebelumnya.

6. Laporan Operasional

Laporan Operasional di Kantor Walikota Medan sebelum menggunakan SIMDA dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu didapatkan hasil bahwa tidak terdapat pendapatan-LO yang disajikan dalam laporan keuangan SKPD baik Pendapatan Asli Daerah-LO, Transfer-LO, dan Pendapatan Lain-lain-LO. Sedangkan pada saat sesudah menggunakan SIMDA Laporan Operasional harus berasal dari kegiatan operasional yaitu Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Pendapatan Lain-lain-LO. Berasal dari Pajak dan Retribusi, Dana Alokasi Khusus, dan Hibah dari Pemerintah Kota maupun Provinsi.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan di Kantor Walikota Medan sebelum menggunakan SIMDA dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu didapatkan hasil bahwa Menjelaskan maksud tujuan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan pada saat sesudah menggunakan SIMDA Laporan keuangan tujuan umum entitas.

Akuntansi pendapatan berbasis akrual sudah diterapkan pemerintah sejak tahun 2015. Kantor Walikota Medan juga sudah menerapkannya sejak tahun 2015 tetapi belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dikarenakan masih banyaknya kendala dalam penerapannya seperti saat menggunakan SIMDA. Sejak tahun 2017 penerapan akuntansi berbasis akrual sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 hingga sekarang. Bahkan, menggunakan basis akrual lebih rumit dibandingkan menggunakan basis kas terutama dulu kita hanya memakai 5 komponen laporan keuangan sekarang jadi 7 komponen laporan keuangan dan manfaatnya untuk publik belum bisa dirasakan. Pada saat pencatatan lebih simpel dan lebih mudah dipahami dengan menggunakan basis

kas. Sedangkan untuk pelaporan lebih enak dan lebih mudah menggunakan basis akrual.

Penerapan aplikasi SIMDA keuangan sudah terlaksana dengan baik, namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala yang sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan sehingga belum cukup untuk dikatakan efektif yaitu Sumber Daya Manusia dan kesalahan teknis yang terjadi akibat gangguan jaringan. Keberhasilan sasaran dan pencapaian tujuan melalui penerapan SIMDA sudah dapat dirasakan oleh semua pihak. Namun untuk kepuasan pengguna masih belum maksimal karena masih ada keluhan dari pegawai saat mengoperasikan SIMDA, juga masih banyak pegawai yang tidak bisa mengoperasikan SIMDA.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaI dalam Menyusun Laporan Keuangan pada Kantor Walikota Medan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Adanya perbedaan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA yaitu bertambahnya komponen laporan keuangan pada saat menggunakan SIMDA.

Komponen laporan keuangan sebelum menggunakan SIMDA antara lain:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sedangkan komponen laporan keuangan sesudah menggunakan SIMDA antara lain:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas
 - f. Laporan Operasional (LO)
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
2. Penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Penyusunan laporan keuangan di Kantor Walikota telah menggunakan sistem SIMDA dan telah sepenuhnya menggunakan basis akrual.

3. Penerapan aplikasi SIMDA keuangan sudah terlaksana dengan baik, namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala yang sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan sehingga belum cukup untuk dikatakan efektif. Keberhasilan sasaran dan pencapaian tujuan melalui penerapan SIMDA sudah dapat dirasakan oleh semua pihak. Namun untuk kepuasan pengguna masih belum maksimal karena masih ada keluhan dari pegawai saat mengoperasikan SIMDA, juga masih banyak pegawai yang tidak bisa mengoperasikan SIMDA.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintahan Kota Medan

Dengan demikian instansi diharapkan lebih memerhatikan sistem dalam menyusun laporan keuangan. Dan instansi harus lebih fokus dan optimal dalam mengatasi kendala tersebut. Supaya penyusunan laporan keuangan Kantor Walikota Medan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Dan untuk mengatasi masalah penerapan aplikasi SIMDA, hendaknya dilakukan pelatihan dan peningkatan kualitas pengguna agar aplikasi SIMDA dapat dimanfaatkan dengan optimal.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat daerah untuk berperan serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan daerah yang lebih baik. Masyarakat daerah sebagai pelaku ekonomi, khususnya wajib pajak diharapkan sadar akan kewajibannya terhadap perekonomian daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan pengamatan dengan meneliti lebih dari satu pemerintahan. Selain itu untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rudi. Analisis Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual: Studi Kasus KPP Pratama Medan. Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis, (Vol. 18. No. 2.), 2017.
- Dahlia, Firdaus. Sigit, Suyogo. Djoko and Wahyuni latifa, Sri. Evaluasi Penerapan PP No 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: Studi Kasus di Pemda Nganjuk. Jurnal Akuntansi dan Investasi, (Vol.16 No. 1.), 2015.
- Deddy, Mulyan. *Ilmu Komunikasi*, Bandung, 2011.
- Eliada, Herwiyanti. *Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan* dalam Jurnal Akuntansi(Vol. 19 No. 1.) 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Hoesada, Jan. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Halim. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Hoesada, Indra. *Akuntansi Sektor Publik* ,Jakarta: Erlangga, 2010.
- <https://medan.tribunnews.com>
- <https://waspada.id>
- <http://duniaangie.blogspot.co.id/2013/10/tafsir-surat-al-baqarah-282.html>
- Ikhsan, Arfan. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Bandung: Citapustaka, 2014.
- Lamonisi, Soni. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Kota Tomoho*, Jurnal EMBA, (Vol. 4 No.1.) 2016.
- Langelo, F. D. P. E. Saerang dan S.W. Alexander. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Bitung*, Jurnal EMBA. (Vol. 3.No. 1.) 2015.

- Mahsun, Mohammad. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*, Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Martani.Dwi, et, al. *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- M. Reeve, et, al. James. *Pengantar Akuntansi Buku I*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Yoyakarta, 2018.
- Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 219/ PMK. 05/ 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/ PMK. 05/ 2013.
- Ratmono. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015.
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Riyanto. Agus, Puji. *Akuntansi Pemerintah*.
- Renny, Maisyara. *Akunansi Sektor Publik Medan*: Fekon Press, 2019.
- Sitompul, Syahman. *Akuntansi Mesjid*, FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Satya, Angie. *TafsirsuratAl-Baqarah282*, 2013.
- Safrina, Utami, S.Intan. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur pemukiman Sumatera Utara*, Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Medan, 2012.
- Sugiyono. *MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wasilah, Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*.Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Wijaya, H. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 24 Tahun 2005) untuk Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel*, Jurnal Akuntansi. (Vol.3.No. 4.) 2008.

Lampiran 1**Pertanyaan Wawancara untuk Kantor Walikota Medan**

1. Bagaimana persepsi bapak terhadap laporan keuangan dengan konsep akrual?
2. Apakah penerapan akuntansi berbasis akrual telah sepenuhnya diterapkan di Kantor Walikota Medan?
3. Bagaimana keefektifan menggunakan basis kas dan basis akrual?
4. Apakah ada kendala dalam penyusunan laporan keuangan daerah dengan menggunakan SAP berbasis akrual?
5. Apa saja yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan daerah menggunakan SAP berbasis akrual?
6. Bagaimana akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan sebelum menggunakan SIMDA?
7. Bagaimana akuntansi pendapatan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SIMDA?
8. Apakah ada kendala dalam penyusunan laporan keuangan daerah menggunakan SIMDA?

Lampiran 2

Jawaban Hasil Wawancara Kantor Walikota Medan

1. Terus terang lebih rumit dek. Terutama kan dulu itu kita hanya memakai 5 komponen laporan sekarang jadi 7 komponen laporan keuangan. Menurut saya pribadi manfaatnya untuk publik belum bisa dirasakan.
2. Iya dek, kita sudah menggunakan SAP berbasis akrual sejak tahun 2015. Tetapi pada tahun 2015 dan 2016 kita belum sepenuhnya menerapkannya, karena masih ada beberapa kendala saat itu.
3. jika saat pencatatan, lebih simpel dan lebih mudah dipahami dengan menggunakan basis kas. Sedangkan, untuk pelaporan lebih enak dan lebih mudah menggunakan basis akrual, karena banyak pencatatan yang bisa kita catat, seperti menghitung aset, menghitung berapa pendapatan untuk beberapa tahun ke depan.
4. Ada dek, kita mendapat ada beberapa kendala pada saat kita menerapkan akuntansi berbasis akrual.
5. Kendala dalam penyusunan laporan keuangan itu terdapat pada sistemnya. Seperti, kalau dipemerintahan daerah menggunakan SIMDA. Misalnya, kejadian kendalanya pencatatan SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) dalam satu tahun, dan biasanya basis akrual kan berakhir dalam satu tahun dan menyambung ke tahun selanjutnya.
6. Laporan keuangan di Kantor Walikota Medan sebelum menggunakan SIMDA terdapat 5 (Lima) komponen yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
7. Laporan keuangan di Kantor Walikota Medan saat menggunakan SIMDA komponen laporan keuangannya bertambah menjadi 7 (Tujuh) komponen yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK).

8. Ada, ada beberapa hambatan atau kendala dalam penerapan aplikasi SIMDA yaitu : Kesalahan teknis yang terjadi akibat gangguan jaringan yang menyebabkan data yang telah di input ke SIMDA tidak dapat tersimpan sehingga pegawai harus menginput data ulang. Gangguan jaringan juga menyebabkan user tidak dapat masuk ke SIMDA.

Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah tahun 2021